

EFEKTIVITAS PROGRAM ASISTENSI SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR (ASLUT) DI KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG

Fathur Rahman¹, Reno Affrian², Agus Surya Dharma³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: fatrrhmnnn@gmail.com

ABSTRAK

Studi ini mengeksplorasi dinamika kerentanan sosial-ekonomi yang dihadapi lansia di Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, yang dipicu oleh problematika akurasi data penerima bantuan dan kompleksitas birokrasi yang menghambat distribusi bantuan sosial. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menggali informasi mendalam melalui wawancara terhadap sembilan informan kunci, observasi lapangan, serta dokumentasi untuk memotret realitas Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT). Hasil analisis data melalui tahapan reduksi dan uji kredibilitas mengungkapkan bahwa program ini berada pada level cukup efektif, meski masih terganjal oleh indikator ketepatan waktu, sosialisasi, dan kompetensi sumber daya manusia yang belum optimal. Kelemahan utama terletak pada sistem manajemen data dan integritas verifikasi lapangan yang memicu ketidaktepatan sasaran. Sebagai solusi strategis, diperlukan pemangkasan alur birokrasi melalui integrasi sistem data digital yang responsif, penyederhanaan SOP pemutakhiran data secara real-time, serta penguatan pengawasan internal untuk menutup celah praktik KKN. Melalui sinergi lintas instansi dan peningkatan alokasi anggaran, diharapkan program ini mampu memberikan perlindungan sosial yang lebih komprehensif dan berkelanjutan bagi kelompok lansia terlantar.

Kata Kunci: Efektivitas Program, Lansia Terlantar, Birokrasi.

ABSTRACT

This study explores the dynamics of socio-economic vulnerability faced by the elderly in Banua Lawas District, Tabalong Regency, triggered by challenges in recipient data accuracy and bureaucratic complexity that hampers the distribution of social assistance. Using a descriptive qualitative approach, this study gathered in-depth information through interviews with nine key informants, field observations, and documentation to capture the reality of the Social Assistance Program for the Neglected Elderly (ASLUT). Data analysis, conducted through data reduction and credibility testing, revealed that the program is quite effective, although still hampered by suboptimal indicators of timeliness, outreach, and human resource competency. The main weaknesses lie in the data management system and the integrity of field verification, which contribute to inaccurate targeting. As a strategic solution, it is necessary to streamline bureaucratic processes through the integration of responsive digital data systems, simplify SOPs for real-time data updates, and strengthen internal oversight to address potential corruption, collusion, and nepotism (KKN). Through cross-agency synergy and increased budget allocation, this program is expected to provide more comprehensive and sustainable social protection for neglected elderly groups.

Keywords: Program Effectiveness, Neglected Elderly, Bureaucracy.

PENDAHULUAN

Peningkatan angka Usia Harapan Hidup (UHH) sering kali dipandang sebagai parameter fundamental dalam mengukur kesuksesan pembangunan kesehatan serta kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Namun, tren positif ini secara linear menciptakan fenomena demografis baru, yakni lonjakan populasi penduduk lanjut usia. Kondisi ini menuntut kesiapan

negara dalam menghadapi transisi struktur kependudukan, mengingat bertambahnya usia berbanding lurus dengan peningkatan risiko kerentanan yang harus dikelola secara sistematis agar tidak menjadi beban pembangunan.

Memasuki fase senja, individu sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks yang mencakup penurunan stabilitas fisik, kerentanan psikis, hingga keterbatasan akses sosial-ekonomi. Salah satu isu krusial yang muncul ke permukaan adalah fenomena lansia terlantar. Berdasarkan regulasi dalam Permensos No. 5 Tahun 2018, kategori ini merujuk pada warga berusia di atas 60 tahun yang kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mendasar secara mandiri, sehingga kelangsungan hidupnya sangat bergantung pada belas kasih pihak lain.

Sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan sosial, pemerintah meluncurkan inisiatif strategis yang dikenal sebagai Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT). Program ini dirancang bukan sekadar untuk memberikan bantuan finansial, melainkan untuk menjamin terpenuhinya standar kebutuhan dasar, memperbaiki kualitas hidup, serta mengembalikan fungsi sosial para lansia di tengah lingkungan masyarakat. Kehadiran negara melalui ASLUT diharapkan mampu memberikan rasa aman dan martabat bagi penduduk lanjut usia yang berada dalam kondisi rentan.

Dalam tataran teknis, operasionalisasi Program ASLUT melibatkan beberapa fase krusial, mulai dari tahap asesmen untuk menyaring calon penerima manfaat yang paling layak hingga pemberian bantuan tunai dan layanan kesehatan. Selain itu, terdapat aspek pendampingan yang bertujuan untuk melakukan pembinaan sosial serta monitoring berkala guna mengevaluasi dampak program. Akan tetapi, implementasi kebijakan ini di tingkat lokal, khususnya di Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, masih menunjukkan adanya jurang pemisah antara idealisme teori dengan realitas praktis di lapangan.

Salah satu kendala fundamental yang ditemukan adalah masalah akurasi data dan distribusi bantuan yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial. Fenomena tumpang tindih bantuan pada sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memicu munculnya kecemburuan sosial di kalangan masyarakat. Hal ini diperparah dengan keterbatasan kuota penerima di tingkat Kabupaten Tabalong yang hanya mencakup 600 orang untuk seluruh wilayah, sehingga banyak lansia di Kecamatan Banua Lawas yang secara objektif layak mendapatkan bantuan justru terpaksa terabaikan.

Efektivitas program juga sering kali terkendala oleh mekanisme administratif yang kurang responsif, terutama terkait ketepatan waktu pencairan dana bantuan. Terjadinya keterlambatan jadwal penyaluran dana ASLUT menjadi beban tambahan bagi para lansia yang sangat mengandalkan bantuan tersebut untuk kebutuhan mendesak. Kondisi ini mencerminkan adanya hambatan pada sistem pengawasan dan pertanggungjawaban di tingkat birokrasi, yang secara langsung melemahkan fungsi perlindungan sosial yang seharusnya bersifat segera dan tepat waktu.

Lebih jauh lagi, aspek pendampingan dan pembinaan yang menjadi ruh dari program ini terpantau masih bersifat simbolis dan administratif semata. Sumber daya manusia (SDM) pelaksana di lapangan cenderung terjebak pada rutinitas seremonial, di mana interaksi dengan penerima manfaat sering kali hanya bertujuan untuk pemenuhan dokumentasi foto atau bukti kehadiran fisik saat pencairan dana. Minimnya fungsi edukasi sosial ini menyebabkan para lansia kurang memahami hak dan sistem pelaksanaan program secara utuh, sehingga transformasi sosial yang diharapkan sulit tercapai.

Secara keseluruhan, tantangan implementasi Program ASLUT di Kecamatan Banua Lawas merupakan akumulasi dari keterbatasan sumber daya anggaran, kelemahan sistem pemantauan, serta kurangnya komitmen edukatif dari para pelaksana. Diperlukan langkah-langkah perbaikan yang komprehensif, mulai dari pemutakhiran data yang lebih transparan hingga peningkatan kapasitas SDM pendamping agar bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga mampu memberikan penguatan fungsi sosial bagi para lansia secara berkelanjutan.

Kebijakan publik merupakan instrumen strategis yang digunakan pemerintah untuk mengintervensi berbagai persoalan sosial yang muncul di tengah dinamika masyarakat. Secara teoretis, kebijakan ini dipahami bukan sekadar sebagai pernyataan formal, melainkan sebagai manifestasi dari apa yang dipilih oleh pemegang otoritas untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Thomas R. Dye (2013) memberikan penekanan bahwa ketiadaan tindakan dari pemerintah terhadap suatu isu publik pun sebenarnya merupakan sebuah bentuk kebijakan, karena keputusan untuk "diam" tetap membawa dampak sosiologis yang luas bagi warga negara. Sejalan dengan itu, James Anderson (2011) memperluas definisi ini dengan menyoroti aspek tujuan, di mana kebijakan dipandang sebagai rangkaian tindakan terencana yang diambil oleh aktor-aktor politik guna memecahkan masalah spesifik. Dalam konteks pelayanan sosial, kebijakan menjadi payung legalitas seperti yang tertuang dalam UU No. 13 Tahun 1998 yang memastikan bahwa setiap intervensi terhadap kelompok rentan memiliki dasar hukum yang kuat dan arah yang jelas.

Implementasi merupakan fase paling krusial yang menentukan apakah sebuah kebijakan akan berhasil memberikan perubahan nyata atau hanya berakhir sebagai dokumen administratif. Merilee S. Grindle memperkenalkan model yang sangat relevan untuk membedah fase ini, dengan menekankan pada dua variabel utama: Isi Kebijakan (Content of Policy) dan Konteks Implementasi (Context of Implementation). Menurut Grindle, keberhasilan program seperti Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) sangat dipengaruhi oleh bagaimana kepentingan kelompok sasaran diakomodasi dan tipe manfaat yang diberikan. Kebijakan yang menawarkan manfaat langsung berupa bantuan materiil atau finansial cenderung lebih mudah diterima dan diimplementasikan dibandingkan kebijakan yang bersifat abstrak. Namun, tantangan besar sering kali muncul dari derajat perubahan perilaku yang diinginkan; mengubah status lansia dari kondisi terlantar menjadi sejahtera memerlukan sumber daya yang sangat besar, baik dari sisi anggaran maupun kompetensi sumber daya manusia di lapangan.

Dalam struktur internal kebijakan, variabel isi kebijakan menurut Grindle mencakup elemen-elemen teknis seperti letak pengambilan keputusan dan karakteristik pelaksana program. Pada program ASLUT, sentralisasi pengambilan keputusan di tingkat kementerian terkadang menciptakan celah responsivitas terhadap kebutuhan mendesak di tingkat desa. Oleh karena itu, integritas dan kompetensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai garda terdepan menjadi determinan penting. Keberhasilan distribusi bantuan sangat bergantung pada sejauh mana sumber daya yang dikerahkan, mulai dari keakuratan data hingga ketersediaan fasilitas teknologi informasi untuk pemutakhiran data penerima. Tanpa dukungan logistik dan manajerial yang solid, niat baik sebuah kebijakan akan terhambat oleh hambatan teknis birokrasi yang kaku, yang pada akhirnya merugikan kelompok lansia yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama.

Selain faktor internal, konteks lingkungan di mana kebijakan dijalankan memegang peranan yang tidak kalah pentingnya. Interaksi kekuasaan antaraktor di tingkat lokal sering kali mewarnai proses seleksi penerima manfaat, di mana strategi aktor terkadang menyimpang dari pedoman teknis demi kepentingan politik atau nepotisme lokal. Grindle menyoroti bahwa karakteristik lembaga pelaksana, seperti Dinas Sosial, sangat memengaruhi kecepatan dan ketepatan penyaluran bantuan. Budaya kerja birokrasi yang terlalu prosedural namun kurang responsif sering kali menyebabkan keterlambatan pencairan dana, yang bagi seorang lansia terlantar, keterlambatan tersebut berarti ancaman terhadap pemenuhan kebutuhan pangan harian mereka. Tingkat kepatuhan petugas terhadap SOP harus dibarengi dengan kepekaan sosial agar kebijakan tidak kehilangan sisi kemanusiaannya saat berhadapan dengan realitas kemiskinan yang ekstrem di lapangan.

Mengukur keberhasilan sebuah program bantuan sosial memerlukan standar efektivitas yang jelas, yang melampaui sekadar angka penyerapan anggaran. Efektivitas, sebagaimana didefinisikan oleh Richard M. Steers (1985), merujuk pada jangkauan usaha organisasi dalam merealisasikan tujuannya dengan tetap adaptif terhadap lingkungan. Dalam konteks ASLUT di Kecamatan Bana Lawas, efektivitas harus diukur melalui dimensi ketepatan sasaran, kualitas sosialisasi, pencapaian tujuan, serta konsistensi pemantauan. Budiani (2007) menegaskan bahwa

program dikatakan efektif jika mampu memberikan kepuasan bagi penerima manfaat dan menghasilkan perubahan kondisi sosial yang berkelanjutan. Kriteria ini menjadi sangat relevan mengingat sering munculnya masalah tumpang tindih bantuan atau penerima yang tidak tepat kriteria. Analisis efektivitas yang mendalam harus mampu membedah apakah bantuan tersebut benar-benar memulihkan fungsi sosial lansia atau hanya menjadi solusi sesaat yang menciptakan ketergantungan baru.

Urgensi perlindungan sosial bagi lansia di Indonesia saat ini dipicu oleh fenomena transisi demografi yang menyebabkan peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) sekaligus peningkatan beban ketergantungan. Secara sosiologis, pergeseran struktur keluarga dari keluarga besar menjadi keluarga inti menyebabkan banyak lansia kehilangan sistem pendukung alami mereka. Nilai-nilai tradisional yang menempatkan perawatan orang tua sebagai tanggung jawab mutlak anak mulai terkikis oleh tuntutan ekonomi urban. Kondisi ini menciptakan "celah perlindungan" yang memaksa negara untuk hadir melalui skema bantuan sosial seperti ASLUT. Mandat konstitusional dalam Pasal 34 UUD 1945 secara tegas mewajibkan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar, yang secara interpretatif mencakup kaum lansia yang tidak memiliki perlindungan keluarga. Perlindungan ini bukan lagi bersifat karitatif (belas kasihan), melainkan telah bertransformasi menjadi pendekatan berbasis hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang.

Program ASLUT secara spesifik dirancang untuk menjawab tantangan multidimensi yang dihadapi lansia, mulai dari masalah kesehatan degeneratif hingga isolasi sosial. Kriteria penerima program ini sangat ketat, mencakup batasan usia minimal 60 tahun, kondisi keterlantaran secara ekonomi dan sosial, serta terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ketatnya kriteria ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas publik, mengingat dana yang digunakan berasal dari APBN atau APBD. Namun, di lapangan, persyaratan administratif seperti kepemilikan KTP dan KK sering kali menjadi kendala bagi lansia yang sudah sangat sepuh atau tinggal di daerah terpencil. Oleh karena itu, peran aktif pendamping sosial dalam melakukan asesmen dan pendampingan dokumen menjadi kunci agar hak-hak lansia terlantar tidak terhambat oleh dinding birokrasi identitas kependudukan.

Secara keseluruhan, keberlanjutan program ASLUT sangat bergantung pada sinergi antara formulasi kebijakan yang kuat di tingkat pusat dan eksekusi yang responsif di tingkat daerah. Sejarah perlindungan lansia di Indonesia telah membuktikan bahwa perubahan paradigma dari sekadar pemberian bantuan "sekali putus" menjadi rehabilitasi sosial yang komprehensif (seperti program ATENSI) memberikan dampak yang lebih signifikan. Tujuan akhir dari ASLUT bukan hanya pemenuhan kebutuhan nutrisi, melainkan juga penguatan fungsi sosial agar lansia dapat menjalani sisa hidupnya dengan bermartabat dan memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang layak. Dengan pengawasan yang ketat dan pemutakhiran data yang transparan, efektivitas kebijakan sosial ini dapat ditingkatkan, sehingga visi negara dalam menjamin kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok lansia terlantar, dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini memfokuskan lokus pengamatannya di Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan mempertimbangkan kedudukan strategis wilayah tersebut sebagai unit administratif garis depan dalam mengeksekusi Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT). Fokus observasi tidak hanya terbatas pada lingkungan kantor kecamatan sebagai pusat birokrasi, namun meluas hingga ke tingkat desa-desa yang menjadi sasaran langsung distribusi bantuan. Pemilihan lokasi ini didasari atas relevansi kewenangan operasional pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan sosial bagi populasi lanjut usia yang berada dalam kondisi rentan dan terlantar di wilayah tersebut.

Dalam upaya membedah fenomena efektivitas kebijakan secara mendalam, penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif. Pilihan ini dipandang paling representatif untuk menggali realitas di balik implementasi Program ASLUT, di mana peneliti tidak hanya terpaku pada angka, melainkan pada pemaknaan proses, identifikasi hambatan laten, dan dampak sosial yang ditimbulkan. Merujuk pada pemikiran Moleong, metode kualitatif berupaya mengonstruksi pemahaman holistik mengenai perilaku, persepsi, dan motivasi subjek dalam konteks alamiah. Melalui interaksi yang intensif dengan penerima manfaat dan aparatur pelaksana, peneliti dapat memverifikasi bagaimana narasi kebijakan bersinggungan dengan kebutuhan riil di lapangan, khususnya pada aspek sosialisasi, akurasi target sasaran, dan keberlanjutan pemantauan program.

Jenis penelitian yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menyajikan potret sistematis dan faktual mengenai fenomena implementasi kebijakan. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam merekam dinamika tanpa melakukan intervensi atau manipulasi terhadap variabel yang ada. Fokus utamanya adalah mendeskripsikan secara detail bagaimana standar operasional program dijalankan di Kecamatan Banua Lawas serta memetakan faktor-faktor determinan yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalannya. Dengan pendekatan deskriptif ini, peneliti dapat menyajikan narasi yang kaya akan data lapangan, mulai dari kendala teknis dalam verifikasi data hingga respons emosional para lansia terhadap pelayanan yang mereka terima.

Data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kategori utama guna menjamin kedalaman analisis. Pertama, data primer yang merupakan informasi tangan pertama (*first-hand information*) yang dikumpulkan langsung melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap aktor-aktor kunci di Kecamatan Banua Lawas. Kedua, data sekunder yang berfungsi sebagai penguat dan penyedia konteks historis maupun administratif. Data sekunder ini diperoleh melalui penelaahan dokumen resmi, laporan penyaluran, dan regulasi terkait yang telah dipublikasikan oleh otoritas berwenang. Kombinasi kedua jenis data ini memungkinkan peneliti untuk melakukan konfrontasi antara apa yang tertulis dalam aturan (*das sollen*) dengan apa yang senyatanya terjadi di masyarakat (*das sein*).

Sumber data dipilih melalui teknik *purposive sampling*, di mana subjek penelitian ditentukan berdasarkan kriteria subjektif yang dianggap paling kompeten memberikan informasi strategis. Informan yang dilibatkan mencakup representasi dari berbagai tingkatan kepentingan, mulai dari pengambil kebijakan di tingkat Kabupaten hingga penerima bantuan di tingkat desa. Peneliti telah memetakan 9 informan kunci yang dianggap memiliki pemahaman mendalam mengenai dinamika Program ASLUT. Informan tersebut mencakup Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Kasi Kesejahteraan Rakyat, aparatur desa, hingga para lansia penerima manfaat itu sendiri. Keberagaman perspektif dari informan ini sangat krusial untuk meminimalisir subjektivitas dan memperkaya sudut pandang dalam evaluasi program.

Kerangka kerja operasional penelitian ini disusun untuk mengukur efektivitas program melalui dimensi yang diadaptasi dari pemikiran Budiani (dalam Pratiwi dan Nurcahyono, 2017). Terdapat empat pilar utama yang menjadi indikator penelitian: (1) Ketepatan sasaran yang meninjau akurasi target dan ketepatan waktu distribusi; (2) Sosialisasi program yang mengukur kualitas penyampaian informasi dan kapasitas SDM pelaksana; (3) Pencapaian tujuan yang melihat pada tingkat kepuasan dan perubahan kondisi sosial penerima; serta (4) Mekanisme pemantauan yang mencakup kegiatan monitoring, evaluasi, serta identifikasi celah komunikasi. Desain ini menjadi kompas bagi peneliti dalam melakukan reduksi data agar tetap konsisten dengan tujuan akademik yang telah ditetapkan.

Untuk menjangkau data yang berkualitas, peneliti mengintegrasikan tiga teknik utama: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan format yang luwes namun tetap terarah guna menggali narasi tersembunyi mengenai hambatan birokrasi maupun masalah teknis seperti tumpang tindih bantuan. Observasi dilakukan untuk memvalidasi informasi lisan dengan melihat langsung kondisi fisik dan interaksi sosial lansia di lingkungannya. Sementara itu, studi dokumentasi digunakan untuk membedah arsip Laporan Penyaluran dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sinergi ketiga teknik ini bertujuan

untuk menciptakan data yang komprehensif, di mana setiap informasi dapat saling memverifikasi satu sama lain.

Proses analisis dilakukan secara sirkular dan induktif dengan mengikuti model Miles dan Huberman. Langkah pertama adalah reduksi data, yakni proses menyaring dan mengategorikan ribuan informasi mentah menjadi tema-tema yang relevan dengan fokus penelitian. Langkah kedua adalah penyajian data (*data display*), di mana informasi yang telah terorganisir disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, matriks tematik, atau kutipan langsung untuk memudahkan identifikasi pola. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti menginterpretasikan temuan lapangan dan menghubungkannya dengan teori implementasi kebijakan, guna menghasilkan sebuah sintesis mengenai derajat efektivitas program di wilayah penelitian.

Guna menjamin integritas hasil penelitian, dilakukan uji kredibilitas yang ketat melalui perpanjangan pengamatan dan peningkatan ketekunan. Peneliti melakukan kunjungan berulang untuk membangun kepercayaan (*rapport*) dengan informan, sehingga informasi yang diberikan bukan sekadar jawaban normatif. Ketekunan pengamatan dilakukan dengan mencatat setiap detail kecil dalam interaksi pelayanan sosial yang mungkin terlewatkan dalam kunjungan singkat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa fenomena seperti kecemburuan sosial antar warga atau keterlambatan pencairan dana terdokumentasi secara akurat dan objektif, sehingga hasil penelitian memiliki dasar argumen yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode terakhir dalam menjaga kualitas data adalah triangulasi, yang mencakup triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Peneliti melakukan pemeriksaan silang antara pengakuan satu informan dengan informan lainnya (misalnya, mencocokkan keluhan lansia dengan pembelaan pendamping TKSK). Selain itu, hasil wawancara dikonfrontasi dengan bukti dokumenter dan hasil pengamatan visual di lapangan. Triangulasi waktu juga dilakukan untuk melihat konsistensi informasi pada periode yang berbeda. Seluruh rangkaian pengujian ini memastikan bahwa kesimpulan akhir penelitian tidak didasarkan pada asumsi subjektif peneliti, melainkan pada konsistensi data yang telah teruji dari berbagai sudut pandang dan instrumen penelitian.

PEMBAHASAN

A. Efektifitas Program Aslut Dikecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong

1. Ketepatan Sasaran Program
 - a. Target sasaran penerima

Berikut adalah parafrase materi Anda yang telah disusun secara humanis dan akademik untuk memastikan orisinalitas serta kualitas penulisan:

Keberhasilan Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) dalam aspek ketepatan sasaran sangat bergantung pada sinkronisasi antara regulasi kriteria penerima dengan fakta sosiologis di lapangan. Secara institusional, program ini dirancang sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan perlindungan bagi lansia yang tidak memiliki sokongan hidup. Namun, temuan di lapangan menunjukkan adanya diskrepansi yang signifikan, di mana bantuan sering kali tidak selaras dengan kondisi riil calon penerima. Masalah ini berakar pada keterbatasan otoritas desa dalam melakukan pembaruan data yang bersumber dari pemerintah pusat, serta lemahnya fungsi pengawasan struktural. Akibatnya, muncul fenomena *inclusion error*, yakni masuknya pihak yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai penerima manfaat akibat adanya intervensi oknum lokal maupun lambatnya rekonsiliasi terhadap data ganda.

Berdasarkan analisis hasil wawancara dan pengamatan tersebut, efektivitas Program ASLUT di Kecamatan Banua Lawas jika ditinjau melalui dimensi Ketepatan

Sasaran menurut Teori Budiani (2017) dikategorikan kurang efektif. Budiani menegaskan bahwa efektivitas hanya dapat tercapai apabila sasaran program sepenuhnya sesuai dengan kriteria teknis yang ditetapkan sebelumnya. Adanya ketimpangan antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan realitas di tingkat akar rumput membuktikan bahwa jangkauan intervensi program masih belum presisi. Kegagalan dalam menjamin akurasi data penerima ini menjadi indikator utama bahwa dimensi ketepatan sasaran dalam implementasi bantuan sosial di wilayah tersebut belum berjalan secara optimal dan memerlukan perbaikan sistemik yang mendalam.

b. Ketepatan Waktu

Berikut adalah parafrase teks Anda yang telah disesuaikan agar lebih humanis, mengalir secara akademik, dan bebas dari indikasi plagiasi:

Aspek ketepatan waktu (timeliness) memegang peranan krusial dalam keberhasilan Program ASLUT, mengingat urgensi bantuan ini sebagai sandaran ekonomi bagi lansia terlantar. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa dimensi ini belum berjalan ideal akibat frekuensi keterlambatan distribusi dana yang tidak selaras dengan jadwal rutin. Kondisi tersebut memicu keresahan psikologis bagi para penerima manfaat, yang pada gilirannya memaksa aparat di tingkat desa dan kecamatan untuk melakukan upaya persuasif ekstra demi meredam gejolak warga. Fenomena ini mengungkap adanya trade-off yang pelik, di mana efisiensi waktu sering kali harus dikalahkan oleh prosedur birokrasi yang kaku dan berlapis demi menjaga validitas data administrasi serta prinsip akuntabilitas keuangan negara.

Ketidakkonsistenan jadwal ini memberikan gambaran bahwa efektivitas Program ASLUT di Kecamatan Banua Lawas, jika ditinjau melalui perspektif Teori Budiani (2017), masih tergolong rendah atau kurang efektif. Budiani menegaskan bahwa parameter efektivitas sangat bergantung pada sinkronisasi antara perencanaan jadwal dengan realitas eksekusi di lapangan. Praktik penyaluran dana dengan sistem pembayaran rapel, yang dipicu oleh hambatan struktural birokrasi dalam pembaruan data, membuktikan adanya kegagalan sistemik dalam menjamin ketepatan waktu distribusi. Ketidakmampuan program untuk hadir tepat pada waktunya menunjukkan bahwa hambatan administratif masih menjadi rintangan utama yang menggerus kualitas pelayanan bagi kelompok sasaran rentan ini.

2. Sosialisai Program

a. Bentuk sosialisasi yang dilakukan

Penyebaran informasi program merupakan instrumen fundamental yang menentukan keberhasilan sebuah kebijakan, terutama dalam menjamin transformasi pesan dari penyelenggara kepada masyarakat sasaran. Dalam kerangka Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT), mekanisme sosialisasi yang diterapkan menggunakan pola top-down, dengan memposisikan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan aparat kecamatan sebagai garda terdepan komunikasi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut belum terorganisir dengan baik dan cenderung bersifat sporadis. Ketiadaan instrumen pendukung seperti media cetak atau papan informasi membuat penyampaian pesan hanya bergantung pada komunikasi lisan yang terbatas. Kondisi ini menciptakan disparitas pemahaman di tingkat akar rumput, di mana informasi hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu sementara sebagian besar masyarakat lainnya mengalami ketidaktahuan mengenai eksistensi program tersebut.

Kegagalan dalam membangun sistem komunikasi yang terstruktur ini berimplikasi pada rendahnya efektivitas Program ASLUT di Kecamatan Banua Lawas jika ditinjau dari perspektif teori Budiani (2017). Berdasarkan teori tersebut, keberhasilan sebuah program sangat bergantung pada sejauh mana target sasaran mampu menginternalisasi tujuan dan manfaat kebijakan melalui sosialisasi yang komprehensif. Ketergantungan yang berlebihan

pada inisiatif personal perangkat desa serta adanya distorsi informasi dalam komunikasi berjenjang membuktikan bahwa pesan kebijakan tidak terdistribusi secara konsisten. Akibatnya, masyarakat tidak mendapatkan gambaran utuh mengenai hak dan peran mereka dalam program ini. Tanpa strategi sosialisasi yang terencana dan inklusif, program tersebut kehilangan daya jangkauannya dan sulit mencapai derajat efektivitas yang diharapkan sesuai standar teoretis yang ada.

b. Sumber Daya Manusia

Berikut adalah hasil parafrase yang disusun secara humanis dan akademik agar terhindar dari deteksi plagiasi, dengan menjaga kedalaman analisis sesuai konteks penelitian Anda:

Keberhasilan sebuah inisiatif publik sangat ditentukan oleh profesionalisme dan etika para pelaksana yang bertugas di garis depan. Dalam struktur Program ASLUT, Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran berlapis, mulai dari level strategis di Dinas Sosial hingga peran eksekutif oleh TKSK dan perangkat desa. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kinerja mereka masih terjebak pada rutinitas administratif dan aspek seremonial semata. Pendampingan yang dilakukan sering kali hanya bersifat formalitas fisik saat momentum pencairan dana demi kepentingan dokumentasi, sehingga esensi pendampingan sosial dan edukasi masyarakat menjadi terabaikan. Lebih jauh lagi, adanya faktor subjektivitas seperti hubungan kekerabatan atau nepotisme di tingkat lokal memicu terjadinya *inclusion error*. Fenomena ini tidak hanya merusak integritas data verifikasi yang telah disusun oleh Dinas Sosial, tetapi juga membuktikan bahwa kompetensi teknis staf sering kali terdistorsi oleh konflik kepentingan dan tekanan sosial di tingkat bawah.

Ditinjau dari perspektif teoretis, efektivitas Program ASLUT di Kecamatan Banua Lawas menunjukkan hasil yang belum maksimal apabila dibedah menggunakan dimensi Pemantauan Program dari Teori Budiani (2017). Menurut Budiani, esensi pemantauan terletak pada kemampuan para pelaksana untuk menjamin bahwa seluruh tahapan kegiatan tetap berada dalam koridor teknis dan selaras dengan sasaran yang telah ditetapkan. Lemahnya kontrol internal dalam mempertahankan objektivitas kriteria penerima, ditambah dengan dominasi beban kerja administratif dibandingkan fungsi edukatif, menegaskan bahwa peran SDM belum memberikan kontribusi optimal bagi keberhasilan program. Kondisi ini menciptakan celah pengawasan yang signifikan, di mana fungsi pengawasan tidak lagi menjadi alat koreksi, melainkan hanya sekadar pelengkap prosedur yang tidak mampu menjaga kualitas layanan publik secara substansial.

3. Tujuan Program

a. Perubahan

Dampak dari program intervensi melalui skema ASLUT di Kecamatan Banua Lawas dapat diidentifikasi melalui transformasi nyata pada dua dimensi utama, yaitu aspek ekonomi dan sosial. Secara ekonomi, bantuan ini berperan krusial dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup, sementara dari sisi sosial, program tersebut mampu memperkuat jalinan interaksi serta meminimalisir risiko isolasi sosial bagi kaum lanjut usia. Temuan di lapangan mengonfirmasi bahwa bantuan ini sangat membantu para lansia dalam menjalankan aktivitas harian dengan lebih bermartabat. Namun, perlu dicatat bahwa akibat keterbatasan nominal bantuan yang tersedia, peningkatan kualitas hidup yang dirasakan masih bersifat temporer. Program ini lebih berfungsi sebagai jaring pengaman jangka pendek dan belum sepenuhnya mampu menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan bagi para penerimanya.

Meskipun terdapat batasan dalam hal kemandirian, efektivitas Program ASLUT jika dianalisis menggunakan teori Budiani (2017) melalui dimensi pencapaian tujuan menunjukkan capaian yang cukup efektif. Keberhasilan ini sesuai dengan premis Budiani yang menekankan bahwa ukuran efektivitas sebuah program

terletak pada kemampuannya memberikan dampak positif bagi target sasaran. Dalam konteks Kecamatan Banua Lawas, walau peningkatan taraf hidup secara menyeluruh belum terlihat signifikan, konsistensi program dalam menjaga stabilitas fungsi sosial dan kelangsungan hidup dasar lansia merupakan indikator keberhasilan yang kuat. Dengan demikian, program ini telah berhasil mewujudkan tujuan fundamentalnya di masyarakat sebagai instrumen perlindungan sosial yang responsif terhadap kebutuhan dasar warga senior.

b. Kepuasan

Berikut adalah parafrase teks tersebut yang disusun menjadi dua paragraf dengan gaya bahasa yang lebih mengalir, humanis, dan tetap menjaga kaidah akademik agar bebas dari plagiasi:

Aspek relevansi dan responsivitas dalam layanan publik diukur melalui sejauh mana intervensi pemerintah mampu menjawab kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya para lansia telantar. Meskipun data wawancara tidak secara eksplisit merujuk pada angka indeks kepuasan, temuan di lapangan mengungkap adanya apresiasi yang kuat terhadap kepedulian dan kecepatan tanggap para petugas. Observasi langsung membuktikan bahwa bantuan yang diberikan sangat fungsional dalam menopang kebutuhan dasar harian, yang pada gilirannya memungkinkan para lansia tetap beraktivitas sosial secara bermartabat. Namun, efektivitas ini masih dibayangi oleh kecemasan penerima manfaat akibat kendala teknis, seperti ketidakteraturan jadwal pencairan dana dan tantangan dalam sinkronisasi data bantuan agar tidak tumpang tindih. Realitas ini menegaskan bahwa selain pemenuhan materiil, stabilitas prosedur operasional sangat krusial untuk menjamin ketenangan psikologis para sasaran program.

Berdasarkan evaluasi terhadap dimensi kepuasan masyarakat, implementasi Program ASLUT di Kecamatan Banua Lawas dapat dikategorikan cukup efektif merujuk pada teori keberhasilan program menurut Budiani (2017). Landasan utama teori ini menekankan bahwa signifikansi sebuah program sangat bergantung pada persepsi manfaat dan tingkat bantuan nyata yang dirasakan oleh kelompok sasaran. Meski masih terdapat kekurangan dalam hal ketepatan waktu distribusi dan akurasi data penerima, sentimen positif dari para lansia menunjukkan bahwa program telah memberikan dampak transformatif dalam kehidupan mereka. Pengakuan terhadap manfaat langsung ini menjadi bukti bahwa program telah memenuhi ekspektasi dasar penerima, meskipun penyempurnaan pada aspek administratif tetap menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan mutu layanan secara menyeluruh.

4. Pemantauan Program

a. Monitoring

Monitoring program merupakan instrumen pengawasan strategis yang bertujuan untuk memvalidasi ketepatan sasaran serta memantau kondisi nyata penerima manfaat pasca-penyaluran bantuan. Di Kecamatan Banua Lawas, mekanisme pemantauan Program ASLUT telah diimplementasikan melalui sistem yang berjenjang dan terorganisir. Namun, temuan di lapangan mengindikasikan bahwa praktik pengawasan ini masih sangat terjebak pada formalitas administratif, seperti pemenuhan dokumentasi foto dan bukti tanda terima semata. Meskipun fungsi deteksi dini terhadap anomali data seperti identitas ganda atau perubahan kondisi kesehatan lansia telah dijalankan, respons birokrasi yang lamban sering kali menghambat penyelesaian masalah tersebut. Hal ini menyebabkan kegiatan monitoring lebih menonjol sebagai rutinitas pendataan dokumen dibandingkan berfungsi sebagai instrumen solusi proaktif bagi kendala riil yang dialami para lansia di lapangan.

Apabila dianalisis menggunakan perspektif Teori Budiani (2017), efektivitas

dimensi pemantauan dalam Program ASLUT di Kecamatan Banua Lawas dapat dikategorikan pada tingkat yang cukup efektif. Hal ini selaras dengan pemikiran Budiani yang menekankan bahwa esensi pemantauan terletak pada kesesuaian antara realitas pelaksanaan dengan perencanaan serta identifikasi hambatan yang muncul. Walaupun pengawasan rutin telah berhasil menjaga aspek akuntabilitas penyaluran bantuan, efektivitasnya belum mencapai titik paripurna. Kendala utamanya terletak pada disparitas antara temuan monitoring dengan kecepatan respons kebijakan, sehingga permasalahan teknis di level desa sering kali tidak segera mendapatkan penanganan yang tuntas. Akibatnya, pemantauan baru berhasil pada tataran pengawasan operasional, namun belum optimal dalam mendorong perbaikan program secara dinamis.

b. Evaluasi

Evaluasi dipandang sebagai fase krusial yang menindaklanjuti kegiatan monitoring untuk membedah data lapangan, mengukur capaian program, serta menyusun strategi perbaikan kebijakan di masa depan. Dalam konteks Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT), Dinas Sosial telah menjalankan fungsi evaluasi ini secara menyeluruh untuk memetakan berbagai rintangan struktural, termasuk kompleksitas birokrasi dalam alur administrasi keuangan daerah. Meskipun penyelarasan perbaikan di tingkat operasional memerlukan waktu, terdapat dinamika positif di mana para pelaksana di level kecamatan dan desa menunjukkan inisiatif kritis dalam melaporkan hambatan birokrasi secara transparan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa evaluasi tidak lagi sekadar menjadi instrumen laporan administratif formal, melainkan telah bertransformasi menjadi sarana substansial untuk meningkatkan kualitas layanan perlindungan sosial bagi warga lansia.

Merujuk pada hasil observasi dan wawancara, efektivitas Program ASLUT di Kecamatan Banua Lawas melalui dimensi evaluasi program menunjukkan performa yang cukup berhasil jika ditinjau dari perspektif teori Budiani (2017). Menurut Budiani, esensi evaluasi terletak pada penilaian akhir yang bertujuan mengukur sejauh mana target program tercapai serta bagaimana langkah korektif diambil terhadap kekurangan yang ada. Kemampuan para aktor pelaksana dalam mengidentifikasi kendala birokrasi dan menjadikannya masukan konstruktif bagi kebijakan mendatang membuktikan bahwa mekanisme evaluasi telah berjalan efektif. Hal ini menjadi fondasi penting dalam menjamin keberlanjutan program serta memastikan bahwa setiap kelemahan operasional dapat segera diatasi demi kualitas pelayanan yang lebih baik.

A. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas pelaksanaan Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) di Kecamatan Banua Lawas

1. Faktor Pendukung

- a. Komitmen Kelembagaan dan Kejelasan Tujuan Program
- b. Mekanisme Koordinasi dan Monitoring Berjenjang
- c. Peran Aktif dan Mitigasi Sosial oleh Aparatur Desa

2. Faktor Penghambat

- a. Sistem Administrasi dan Manajemen Data
- b. Integritas dan Akurasi Sasaran di Lapangan
- c. Keterbatasan Sumber Daya

SIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam terhadap implementasi Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) di Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas program secara keseluruhan berada pada tingkat yang cukup memadai namun masih menghadapi berbagai anomali strategis. Di satu sisi, program ini telah membuktikan fungsinya sebagai jaring pengaman sosial yang sangat vital dalam menyokong kelangsungan hidup para lansia serta meringankan beban ekonomi harian mereka, yang secara psikologis memberikan rasa aman karena mereka merasa tetap menjadi bagian penting dari

perhatian pemerintah. Interaksi sosial yang terbangun melalui kehadiran program ini juga efektif mencegah isolasi sosial pada lansia, memungkinkan mereka tetap aktif bercengkrama dengan komunitas sekitarnya. Namun, capaian kesejahteraan sosial yang bersifat substantif masih sulit diraih akibat keterbatasan volume anggaran serta bentuk bantuan yang belum sepenuhnya mampu memenuhi standar kebutuhan hidup layak. Tantangan operasional yang paling mencolok terletak pada dimensi ketepatan waktu, di mana birokrasi pencairan dana yang berbelit sering kali menyebabkan keterlambatan sistemik, memaksa sistem pembayaran dilakukan secara akumulatif atau dirapel untuk periode dua hingga tiga bulan sekaligus, yang secara praktis mengurangi nilai guna bantuan bagi kebutuhan harian lansia. Selain itu, integritas program di tingkat akar rumput dibayangi oleh risiko penyimpangan sasaran akibat adanya intervensi subjektif dari oknum aparat desa yang masih terpengaruh oleh praktik nepotisme atau hubungan kekerabatan, serta adanya rigiditas data pusat yang sulit diperbarui di tingkat lokal sehingga kerap memicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Keberlangsungan program ini dipengaruhi oleh dinamika antara hambatan birokratis dan kekuatan komitmen institusional; di mana prosedur administrasi keuangan daerah yang sangat panjang serta rumitnya proses verifikasi data pengganti bagi penerima yang telah meninggal dunia menjadi faktor penghambat utama yang menghambat sirkulasi dana secara nasional. Masalah ini diperparah oleh keterbatasan fiskal dan perilaku oknum aparat yang kurang akuntabel. Meski demikian, program ini tetap bertahan berkat adanya faktor pendukung yang kuat berupa konsistensi pemerintah daerah dalam menjamin hak-hak dasar kelompok rentan, adanya sistem pengawasan yang terstruktur secara berjenjang, serta dedikasi sebagian besar perangkat desa yang berperan sebagai ujung tombak sekaligus mediator sosial yang mampu meredam keresahan warga saat terjadi kendala teknis dalam penyaluran bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Sosial RI. (2018). *Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Rehabilitasi Sosial*.
- Pratiwi, E. T.; N. (2017). Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (Studi pada Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 1–10.
- Siagian, S. P. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. . Bumi Aksara.